

PERAN WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KURIKULUM DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI SDN SUMUR WELUT 3 SURABAYA

Siti Nur A'isyah¹, Silvia Dwi Nur Kamalia², Dewi Ismayani Gendra Bawana³, Zahrotun Fisabil Jannah⁴, Novalraya Wahyu Widodo⁵, Rezki Nurma Fitria⁶

^{1,2,3,4,5,6}Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2025-10-25

Revised 2025-11-05

Accepted 2025-11-16

ABSTRAK

Implementasi Kurikulum Merdeka (KM) menimbulkan tantangan dalam mentransformasikan kebijakan ke dalam praktik kelas, menuntut pergeseran peran Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dari administratif menjadi kepemimpinan pedagogis yang strategis. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Wakil Kurikulum dalam menjamin keputusan kurikulum secara signifikan memengaruhi kualitas pembelajaran dan capaian kompetensi siswa. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif-deskriptif di SDN Sumur Welut 3 Surabaya, temuan utama mengindikasikan integrasi bimbingan dan supervisi melalui dua strategi: (1) penguatan karakter dan kompetensi melalui sistem rotasi ketua kelompok bulanan yang membangun kepemimpinan dan kolaborasi siswa; dan (2) budaya evaluasi berkelanjutan melalui forum "Kamis Giat" yang meninjau video praktik, mendorong perencanaan pembelajaran mendalam guru. Dengan demikian, peran non-administratif Wakil Kurikulum terbukti krusial sebagai agen perubahan dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan KM dan implementasi efektif di lapangan.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka; Kepemimpinan Kurikulum; Wakil Kepala Sekolah; Kualitas Pembelajaran; Rotasi Ketua Kelompok

ABSTRACT

The implementation of Kurikulum Merdeka (KM) presents challenges in transforming policy into classroom practice, necessitating a shift in the Vice Principal of Curriculum's role from administrative to strategic pedagogical leadership. This study aims to analyze the strategies employed by the Vice Principal in ensuring curriculum decisions significantly influence teaching quality and student competency attainment. Employing a descriptive-qualitative case study approach at SDN Sumur Welut 3 Surabaya, the core findings indicate the integration of guidance and supervision through two strategies: (1) strengthening character and competence via a monthly group leader rotation system that develops student leadership and collaboration; and (2) establishing a continuous evaluation culture through the "Kamis Giat" forum, which reviews practice videos, prompting deep lesson planning among teachers. Thus, the Vice Principal's non-administrative role is proven crucial as an agent of change in bridging the gap between KM policy and effective field implementation.

Keyword: Merdeka Curriculum; Curriculum Leadership; Vice Principal; Learning Quality; Group Leader Rotation

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya; Indonesia

1. PENDAHULUAN

Kurikulum adalah komponen penting dalam dunia pendidikan yang berfungsi sebagai panduan untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Perubahan kebijakan kurikulum di Indonesia yang kini beralih ke Kurikulum Merdeka merupakan langkah strategis dari pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan serta mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di abad ke-21. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berfokus pada siswa, diferensiasi, serta pengembangan keterampilan dan karakter (Yunita, 2023). Dalam hal ini peran pemimpin sekolah, terutama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sangat penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan kurikulum berlangsung sesuai dengan tujuan yang diinginkan

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum memegang tanggung jawab strategis dalam merencanakan, melaksanakan, serta menilai semua aktivitas pembelajaran agar sejalan dengan prinsip Kurikulum Merdeka. Peran ini mencakup kolaborasi dengan guru, penyusunan alat pengajaran, supervisi pembelajaran, serta penguatan budaya belajar yang adaptif dan inovatif. Keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajerial dan kepemimpinan akademis dari Wakil Kepala Sekolah (Rahmat & Wahyudin, 2021). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran tersebut sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat sekolah dasar.

SDN Sumur Welut 3 Surabaya adalah salah satu sekolah dasar negeri yang telah mulai menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dalam mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka guna meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan mengenai strategi, tantangan, dan usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan diorientasikan pada kebutuhan siswa.

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pembaruan kurikulum yang menekankan fleksibilitas, kemandirian belajar, dan diferensiasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Kurikulum ini bertujuan untuk membangun kompetensi dan karakter siswa melalui pengalaman belajar yang bermakna, kontekstual, dan berpusat pada siswa (Yunita, 2023). Dalam pelaksanaannya, Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk menjadi fasilitator pembelajaran yang mampu merancang modul ajar, asesmen formatif, serta pembelajaran berbasis proyek yang mendukung Profil Pelajar Pancasila. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum memiliki tanggung jawab sentral dalam memastikan keberlangsungan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Peran ini tidak hanya administratif, tetapi juga bersifat kepemimpinan pedagogis yang memfasilitasi guru dalam memahami perubahan kurikulum serta membangun budaya belajar inovatif (Rahmat & Wahyudin, 2021). Pada konteks Kurikulum Merdeka, Wakil Kepala Sekolah bertindak sebagai pengarah kebijakan kurikulum, pengawas mutu pembelajaran, serta koordinator pengembangan modul ajar dan proyek P5.

Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar memerlukan dukungan kolaboratif antara kepala sekolah, wakil kurikulum, guru, dan orang tua. Kegiatan seperti sosialisasi kurikulum, pengembangan rencana pembelajaran tahunan, supervisi klinis, serta pendampingan guru menjadi strategi penting untuk memastikan kesesuaian penerapan dengan karakteristik peserta didik (Nursafinah et al., 2024). Selain itu, penggunaan pembelajaran mendalam (Deep Learning) dan pembelajaran berbasis proyek terbukti mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan karakter siswa (Isnayanti et al., 2025).

Dalam praktiknya, Kurikulum Merdeka menghadirkan beberapa tantangan, terutama ketidaksiapan guru dan perbedaan pola pikir dalam menyesuaikan strategi pembelajaran yang fleksibel. Selain itu, pendampingan dan pengembangan kapasitas guru memerlukan manajemen waktu yang baik, sehingga seringkali menuntut upaya tambahan dari tenaga pendidik (Masri et al., 2023). Karena itu, supervisi berkelanjutan dan pembinaan kolaboratif melalui forum refleksi seperti Kamis Giat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan mutu implementasi. Keterlibatan orang tua memiliki kontribusi penting dalam membangun motivasi dan kemandirian belajar siswa. Pada Kurikulum Merdeka, komunikasi aktif antara sekolah dan orang tua melalui komite sekolah, grup kelas, dan sosialisasi kurikulum membantu menciptakan dukungan yang selaras antara lingkungan sekolah dan rumah (Nurwidyayanti et al., 2024).

2. METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial, yaitu peran manajerial dan pedagogis seorang individu dalam sebuah konteks organisasi yang spesifik (Ardiansyah et al., 2023). Sifat deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran yang rinci, sistematis, dan faktual mengenai proses, strategi, dan tantangan yang ada. Desain studi kasus ditetapkan sebagai kerangka kerja penelitian. Desain ini dianggap paling tepat karena tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam, rinci, dan holistik fenomena peran Wakil Kepala Sekolah (Waka) Bidang Kurikulum. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi "bagaimana" (how) dan "mengapa" (why) seorang Waka Kurikulum menjalankan perannya dalam konteks spesifik di SDN Sumur Welut 3 Surabaya, yang bertindak sebagai lokus atau latar penelitian. Subjek dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling (penarikan sampel bertujuan). Informan kunci (key informant) dalam penelitian ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di sekolah tersebut. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki posisi yang paling sentral dan otoritas pengetahuan yang paling komprehensif mengenai seluruh siklus manajemen kurikulum, mulai dari perencanaan, implementasi di kelas, hingga evaluasi.

Teknik pengumpulan data yang utama adalah wawancara mendalam, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menjaga fokus penelitian namun tetap fleksibel. Peneliti menggunakan pedoman wawancara terdiri dari 10 pertanyaan utama sebagai acuan untuk memastikan semua aspek yang diteliti tercakup. Fleksibilitas dalam wawancara semi-

terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan pendalaman untuk menggali informasi lebih lanjut yang muncul secara spontan selama proses wawancara. Untuk menjamin integritas dan akurasi data, seluruh proses wawancara direkam menggunakan perangkat audio dengan izin penuh dari informan. Analisis informasi dalam studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui beberapa langkah yang terstruktur, yang mengambil inspirasi dari model analisis interaktif. Langkah pertama adalah Transkripsi Data, yaitu mengubah seluruh hasil rekaman suara wawancara menjadi teks naratif yang penting untuk mentransformasikan informasi lisan menjadi tulisan. Langkah selanjutnya adalah Reduksi dan Organisasi Data, di mana peneliti selektif, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data yang relevan, kemudian mengelompokkannya berdasarkan kategori tematik sesuai dengan pertanyaan penelitian. Langkah ketiga adalah Penyajian Data, yang melibatkan penyampaian data yang telah diorganisir secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan keterkaitan antar data. Terakhir, tahapan Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan adalah proses akhir analisis data untuk menjawab semua pertanyaan penelitian serta menyusun kesimpulan yang sah mengenai peran Waka Kurikulum dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dan Implementasi Kurikulum

Proses Perencanaan Kurikulum dilakukan Agar Selaras Dengan Prinsip Kurikulum Merdeka

Proses perencanaan kurikulum operasional di satuan pendidikan (KOSP) merupakan sebuah langkah strategis yang fundamental, diawali dengan konsolidasi dan pelibatan intensif dari seluruh stakeholder internal sekolah. Pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan (stakeholder) dapat diartikan sebagai individu yang memiliki peran penting dan memberikan dukungan terhadap pendidikan atau institusi pendidikan. Pemangku kepentingan mencakup orang-orang atau organisasi yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap aktivitas pendidikan yang berlangsung di sekolah. Secara umum, pemangku kepentingan dalam pendidikan dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu sekolah, pemerintah, dan masyarakat (Sundari & Pharama, 2021).

Inisiasi pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan (KOSP) menuntut pergeseran paradigma fundamental, beralih dari pendekatan top-down yang instruktif menuju model bottom-up yang partisipatif dan kontekstual. Pendekatan top-down semata, di mana kebijakan dan struktur kurikulum didikte oleh manajemen puncak, seringkali menciptakan disonansi yang signifikan antara perencanaan (dokumen) dan implementasi (realitas kelas). Metode ini umumnya diterapkan di negara-negara yang memiliki sistem pendidikan terpusat. Metode ini dikenal dengan sebutan top down karena proses perancangan kurikulum dimulai dari keinginan atau inisiatif orang-orang yang berkuasa, pejabat di bidang pendidikan, atau pengambil keputusan, serta para administrator seperti direktur jenderal atau kepala daerah, melalui jalur komando, dan kemudian dilanjutkan serta disebarkan ke tingkat bawah (Panjaitan et al., 2024). Model ini sering kali gagal karena mengabaikan realitas empiris dan kebutuhan spesifik yang hanya dapat diidentifikasi oleh

praktisi di garda terdepan, yakni guru dan tenaga kependidikan. Kegagalan top-down biasanya terjadi ketika pimpinan tidak hanya mengatur "Apa" tujuannya, tetapi juga terlalu kaku mengatur "Bagaimana" cara mencapainya, tanpa melibatkan pelaksana di lapangan.

Oleh karena itu, agar kurikulum berfungsi sebagai "nyawa sekolah", inisiatifnya harus "tumbuh" secara organik dari dalam institusi. Proses ini harus diawali dengan analisis kebutuhan (needs analysis) yang jujur dan pemetaan realitas sumber daya yang ada. Dengan memposisikan guru bukan hanya sebagai eksekutor tetapi sebagai agen perumus, rasa kepemilikan (ownership) terhadap kurikulum akan meningkat secara drastis. Kurikulum yang dihasilkan dari proses bottom-up ini terjamin akan lebih aplikatif, relevan, dan memiliki daya tahan implementasi yang lebih tinggi karena ia dirancang untuk menjawab masalah nyata, bukan sekadar memenuhi tuntutan administratif. Pendekatan bottom-up merupakan metode pembuatan kurikulum yang berfokus pada kebutuhan dari bawah, seperti sekolah sebagai unit pendidikan atau tenaga pengajar. Aspirasi ini sering kali dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki oleh guru atau institusi pendidikan, di mana terdapat berbagai ketidakcocokan atau isu antara kebutuhan dan kapasitas yang ada pada kurikulum yang sedang diterapkan (Panjaitan et al., 2024).

Langkah pertama yang krusial adalah penyelenggaraan rapat internal. Rapat ini memiliki agenda yang krusial, yakni menyatukan persepsi, melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum tahun sebelumnya, dan mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik serta tuntutan zaman. Rapat ini harus melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah, mulai dari jajaran pimpinan, seluruh guru mata pelajaran hingga wali kelas, serta tenaga kependidikan seperti staf administrasi dan perpustakaan, karena setiap elemen memiliki perspektif yang berbeda terhadap operasional sekolah. Dari hasil rapat dan musyawarah tersebut, langkah selanjutnya adalah formalisasi tim kerja. Kepala Sekolah kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) resmi untuk membentuk sebuah Tim Pengembang Kurikulum (TPK) tingkat satuan pendidikan. Keberadaan SK ini sangat penting karena menjadi landasan yuridis, legitimasi, serta definisi peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota tim. Anggota TPK ini, yang merupakan representasi dari unsur guru dan tenaga kependidikan, akan menjadi penggerak utama dalam perumusan draf kurikulum.

Setelah tim terbentuk dan terlegalisasi, mereka memulai tugas substantif seperti penyusunan Dokumen Satu Kurikulum atau KOSP. Proses ini bukanlah penyusunan dokumen dalam ruang hampa. Tim harus secara cermat mengacu pada kerangka standar nasional, seperti Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta petunjuk teknis dan regulasi turunan yang telah diberi rambu-rambu oleh Dinas Pendidikan setempat. Dinas Pendidikan berperan sebagai fasilitator, supervisor, dan mitra konsultasi untuk memastikan bahwa KOSP yang disusun selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah. Dalam proses itu, keterlibatan diperluas untuk memasukkan para pemangku kepentingan luar yang memiliki hubungan yang relevan. Pihak sekolah secara aktif berkolaborasi dengan Komite Sekolah. Peran komite ini sebagai wakil orang tua dan masyarakat dipandang sangat penting. Hal ini dikarenakan, kurikulum dianggap sebagai "kontrak sosial" yang menggambarkan visi, misi,

dan program kerja sekolah dengan jelas untuk tahun yang akan datang. Persetujuan serta saran dari komite memastikan dukungan dari orang tua dan kesesuaian antara program sekolah dengan harapan masyarakat.

Selain komite, para pelatih ekstrakurikuler juga diikutsertakan secara aktif. Dalam kerangka Kurikulum Merdeka yang menekankan perkembangan menyeluruh, kegiatan ekstrakurikuler telah bertransformasi dari sekadar pelengkap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan karakter dan minat siswa. Masukan dari mereka sangat penting untuk memastikan adanya keterkaitan antara pembelajaran intrakurikuler dan aktivitas pengembangan diri. Sebagaimana ditegaskan oleh narasumber, kurikulum harus diposisikan sebagai "nyawanya sekolah". Perumpamaan ini sangat kuat, menunjukkan bahwa KOSP adalah dokumen hidup yang menjadi rujukan sentral, menentukan arah kebijakan, alokasi sumber daya, dan tujuan spesifik yang ingin dicapai sekolah. Seluruh strategi dan operasional harian harus berhulu pada dokumen ini.

Untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip dinamis Kurikulum Merdeka, seperti fleksibilitas dan fokus pada kompetensi, KOSP harus memuat bab-bab spesifik misalnya, di Bab 3 atau Bab 4 yang secara rinci membahas tentang perencanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dokumen ini juga wajib hukumnya untuk mengintegrasikan regulasi terbaru, seperti Capaian Pembelajaran (CP) termutakhir, contohnya "CP 46 2025". Prinsip utamanya adalah bahwa CP sebagai tujuan akhir dan dokumen perencanaan pembelajaran sebagai cara mencapainya telah disesuaikan dan disinkronkan. Lebih lanjut, KOSP juga berfungsi sebagai dokumen panduan internal. Jika terdapat pendidik yang belum sepenuhnya mengerti prinsip-prinsip dasar dari Kurikulum Merdeka, seperti metode "pembelajaran mendalam" yang mengutamakan pemahaman konsep serta penerapan, bukan sekadar penghafalan, maka penjelasan mengenai hal ini harus dicantumkan secara langsung dalam dokumen tersebut, contohnya pada Bab 4. Hal ini menegaskan kembali bahwa Dokumen Satu Kurikulum atau KOSP bukan hanya sebuah syarat administratif yang dibiarkan di dalam lemari, tetapi benar-benar berfungsi sebagai "nyawanya sekolah". Dokumen tersebut menjadi referensi utama, panduan bagi seluruh anggota sekolah, para pendidik, serta siswa mengenai tata cara dan panduan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati bersama.

Peran Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum memiliki peranan sentral dalam mengarahkan dan memastikan proses pembelajaran berjalan selaras dengan visi sekolah serta kebutuhan peserta didik. Di SDN Sumur Welut 3 Surabaya, peran ini diwujudkan melalui serangkaian langkah strategis yang berkelanjutan, mulai dari penyusunan arah kebijakan kurikulum hingga pendampingan implementasi di tingkat guru. (Nursafinah et al., 2024).

Langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan Tim Pengembang Kurikulum (Timpengkur) melalui Surat Keputusan (SK) resmi sekolah. Tim ini kemudian menjadi wadah koordinasi dalam pembahasan serta penyusunan kebijakan kurikulum yang akan diterapkan selama satu tahun pelajaran. Setelah tim terbentuk, Wakil Kepala Sekolah bersama Timpengkur menyelenggarakan rapat lanjutan untuk melakukan peninjauan dan pembaruan

visi dan misi sekolah. Hal ini penting karena visi dan misi harus menyesuaikan perubahan pendekatan pembelajaran di Kurikulum Merdeka, sehingga arah perkembangan peserta didik tetap relevan dengan tuntutan pendidikan masa kini. Selain itu, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum juga berperan dalam menyusun perencanaan program pembelajaran tahunan. Penyusunan ini dilakukan dengan menganalisis kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, lalu mengintegrasikan berbagai kegiatan sekolah seperti peringatan Hari Besar Nasional, pameran karya siswa, hingga jadwal penilaian dan pembagian rapor. Perencanaan yang sistematis ini memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki keterkaitan dengan tujuan pembelajaran dan penguatan karakter peserta didik.

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, Wakil Kepala Sekolah juga turut mengikuti diklat (pelatihan) Kurikulum Merdeka yang diselenggarakan oleh BPTGTK. Melalui pelatihan ini, beliau memperoleh pemahaman mengenai penyusunan perencanaan pembelajaran, strategi pelaksanaan proyek penguatan profil Pelajar Pancasila, serta pendekatan pembelajaran yang fleksibel sesuai karakteristik siswa. Pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan kemudian didiseminasikan kepada guru-guru melalui kegiatan pendampingan dan koordinasi. Dengan demikian, guru memiliki acuan yang jelas dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau modul ajar yang sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum di SDN Sumur Welut 3 berperan tidak hanya sebagai penyusun kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator, pengarah, dan pendamping guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Peran ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya bergantung pada dokumen formal, melainkan pada koordinasi yang baik, komitmen bersama, dan kesediaan untuk terus belajar menghadapi dinamika pendidikan yang berkembang.

Selain itu, di SDN Sumur Welut 3 terdapat ruang diskusi mingguan yang digunakan untuk membahas pelaksanaan asesmen sumatif. Dalam kegiatan tersebut, guru diminta untuk mempersiapkan kebutuhan asesmen seperti soal lisan, dokumen pendukung, atau bentuk asesmen lain yang sesuai.

Untuk proyek pembelajaran, pelaksanaannya masih bersifat sederhana dan disesuaikan agar lebih mudah diterapkan. Langkah-langkah kurikulum di SDN Sumur Welut 3 ini merupakan hasil dari pelatihan dan diklat PM, yang kemudian diterapkan melalui perencanaan dan asesmen sekolah. Selain itu, analisis kalender akademik sekolah dasar juga telah disusun secara rinci, termasuk jadwal pelaksanaan asesmen sumatif.

Strategi Yang Digunakan Untuk Mendukung Guru Dalam Melaksanakan Pembelajaran Berbasis Kurikulum Merdeka

Strategi utama untuk mendukung guru dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka adalah penerapan pendekatan pembelajaran mendalam (PM) atau deep learning. Penerapan metode deep Learning sejalan dengan pengembangan kompetensi di abad ke-21 yang meliputi berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, serta kolaborasi. Dengan metode ini, siswa tidak hanya mendapatkan pemahaman konsep materi, tetapi juga dapat menganalisis, menilai, dan menerapkan pengetahuan dalam beragam situasi kehidupan nyata. Keterampilan tersebut menjadi persiapan yang signifikan bagi siswa untuk menghadapi

tantangan di zaman digital dan globalisasi (Isnayanti et al., 2025). Esensi dari pendekatan ini adalah mentransformasi proses belajar dari sekadar transfer pengetahuan teoretis menjadi sebuah pengalaman yang bermakna dan relevan bagi siswa. Hal ini dirancang sebagai antitesis terhadap pembelajaran konvensional, di mana siswa sering kali gagal menghubungkan materi dengan konteks nyata dan mempertanyakan relevansi dari apa yang mereka pelajari, yang sering terdengar dari pertanyaan, "Belajar ini buat apa sih, Bu?". Pembelajaran mendalam hadir untuk mengatasi diskoneksi ini, memastikan bahwa pembelajaran tidak berhenti di tataran teori, tetapi memiliki aplikasi yang jelas untuk kehidupan siswa di kemudian hari.

Secara spesifik, strategi pembelajaran mendalam ini diimplementasikan melalui kerangka kerja 3M, yaitu Memahami, Mengaplikasi, dan Merefleksi. Tahap Memahami menekankan pada pemahaman konseptual yang melampaui hafalan; siswa didorong untuk dapat menjelaskan konsep dengan bahasa mereka sendiri. Selanjutnya, tahap Mengaplikasi menjadi jantung dari pembelajaran bermakna. Di sinilah siswa ditantang untuk menggunakan pengetahuan mereka untuk memecahkan masalah nyata dan kontekstual, misalnya melalui pembelajaran berbasis proyek, sehingga mereka dapat melihat secara langsung aplikasi dari ilmu yang didapat dan menjawab pertanyaan "mengapa" mereka belajar.

Tahap terakhir adalah Merefleksi, sebuah langkah krusial yang sering terlewatkan di mana siswa diajak melakukan kegiatan memikirkan kembali proses belajar mereka, apa yang telah dipelajari, dan bagaimana pengetahuan tersebut mengubah cara pandang mereka. Narasumber menambahkan bahwa konsep pembelajaran mendalam ini sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya baru bagi para guru. Banyak guru yang secara substansi sudah melakukannya secara intuitif, meskipun mungkin dengan terminologi yang berbeda ("cuma seperti kayak beda istilah"). Peran Kurikulum Merdeka di sini adalah untuk mempertegas dan memperketat proses yang baik ini agar menjadi standar yang sistematis. Pada intinya, guru didorong untuk beralih peran dari sekadar penyampai materi menjadi desainer dan fasilitator pengalaman belajar. Tugas utamanya adalah mendesain sebuah alur pembelajaran (menggunakan siklus 3M) sedemikian rupa agar siswa tidak hanya tahu, tetapi dapat benar-benar paham, mengerti, dan merasakan bahwa pembelajaran itu bermakna dan bernilai bagi kehidupan mereka.

Langkah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk memperkuat pelatihan guru dalam memahami asesmen formatif dan sumatif berbasis Kurikulum Merdeka

Pendekatan ini memandang asesmen dan pembelajaran sebagai satu siklus. Asesmen memberikan data tentang perencanaan pembelajaran yang diperlukan, dan informasi dari asesmen digunakan untuk menilai seberapa efektif proses pembelajaran berjalan. Asesmen yang tidak direncanakan dengan baik tentu saja akan menghasilkan data yang tidak akurat tentang seberapa baik tujuan pembelajaran siswa tercapai. Sementara itu, asesmen sumatif adalah proses pengumpulan data peserta didik yang biasanya dilakukan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dan menentukan status peserta didik individu. Penilaian formatif dan

sumatif bekerja sama untuk mencapai tujuan yang berbeda, tetapi keduanya penting untuk meningkatkan prestasi akademik siswa (Azizah, 2025).

Dalam langkah penyusunan dokumen kurikulum, terdapat beberapa panduan asesmen yang menjadi acuan. Pertama, panduan asesmen tercantum dalam Buku Panduan Unsur Langkah SP, dan kedua, terdapat panduan penyusunan kurikuler yang juga mengatur tentang asesmen. Semua panduan tersebut telah ditetapkan dan dijelaskan lebih lanjut pada Buku Panduan SDN Sumur Welut 3, khususnya di Bab 3 dan Bab 4 yang membahas mengenai asesmen.

Di SDN Sumur Welut 3, dalam satu semester terdapat empat asesmen sumatif. Sementara itu, asesmen formatif dilaksanakan melalui LKPD selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk asesmen sumatif, pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dan merata tanpa adanya perbedaan antar peserta didik. Selain itu, di SDN Sumur Welut 3 terdapat ruang diskusi mingguan yang digunakan untuk membahas pelaksanaan asesmen sumatif. Dalam kegiatan tersebut, guru diminta untuk mempersiapkan kebutuhan asesmen seperti soal lisan, dokumen pendukung, atau bentuk asesmen lain yang sesuai.

Untuk proyek pembelajaran, pelaksanaannya masih bersifat sederhana dan disesuaikan agar lebih mudah diterapkan. Langkah-langkah kurikulum di SDN Sumur Welut 3 ini merupakan hasil dari pelatihan dan diklat PM, yang kemudian diterapkan melalui perencanaan dan asesmen sekolah. Selain itu, analisis kalender akademik sekolah dasar juga telah disusun secara rinci, termasuk jadwal pelaksanaan asesmen sumatif.

Evaluasi Menyeluruh IKM: Hubungan antara Berpikir Kritis, Kreativitas, dan Karakter Siswa di SDN Sumur Welut

Penilaian efektivitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka (IKM) di SDN Sumur Welut 3 menunjukkan bahwa tujuan untuk mengembangkan kompetensi Profil Pelajar Pancasila (PPP), yang meliputi berpikir kritis, kreativitas, dan karakter, telah dicapai dengan baik. Keberhasilan ini terutama berkat inisiatif guru yang merancang proses belajar dengan fokus pada siswa sebagai pusat perhatian (Kollo & Suciptaningsih, 2024). Metode pembelajaran yang berbasis proyek (Project-Based Learning/PjBL) serta penyelesaian masalah (Problem-Based Learning/PBL) diaplikasikan secara teratur untuk menstimulasi keterampilan analisis, sintesis, dan penciptaan produk, yang terbukti secara signifikan memperkuat aspek kritis dan kreatif (Zahrotun & Kamal, 2023).

Dalam rangka membentuk karakter, IKM di SDN Sumur Welut 3 dilaksanakan melalui enam dimensi PPP yang terintegrasi dalam budaya sekolah, intrakurikuler, dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) (Lailatul Istiqomah, 2023). Secara inovatif, guru menerapkan sistem rotasi ketua kelompok setiap bulan dan secara bergiliran menugaskan 'tutor ahli'. Pendekatan ini merupakan intervensi strategis untuk melatih kepemimpinan, kerja sama, dan kemandirian secara seimbang, sekaligus menangani potensi karakter negatif (seperti kesombongan) pada siswa yang menonjol serta meningkatkan rasa percaya diri siswa yang lebih pendiam (Pangkey & Sarudi, 2024).

Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidakseimbangan atau kurangnya efisiensi, tindakan intervensi dilakukan secara teratur dan kolektif. Kepala sekolah bersama wakil kurikulum memanfaatkan forum mingguan yang dinamakan "Kamis Giat" untuk mengevaluasi dan berbagi praktik antar pengajar, di mana permasalahan seputar penerapan kurikulum dan karakter siswa dianalisis secara bersama. Untuk memastikan akuntabilitas, diterapkan sistem pemantauan visual melalui berbagi rekaman video pelaksanaan P5 oleh guru, yang memungkinkan pengidentifikasian kekurangan dalam implementasi dan mendorong inisiatif perbaikan diri (Muliardi, 2023). Melalui adanya standarisasi dalam rencana dan siklus evaluasi yang berkesinambungan, SDN Sumur Welut 3 membuktikan bahwa keberhasilan IKM dihasilkan dari kerjasama guru yang berkomitmen pada pengembangan menyeluruh siswa.

Dampak Transformasi pada Proses Pembelajaran dan Peran Guru

Pengaruh Perubahan pada Proses Pembelajaran dan Peran Pengajar Pelaksanaan KM mendorong pergeseran perhatian dari aspek administratif menuju aspek pedagogis yang lebih mendalam, dimulai dari posisi kunci Wakil Kurikulum yang memiliki peranan sangat krusial dalam memberikan arahan dan pengawasan (Aulia & Darmansah, 2025). Bagi para guru, ini berarti adanya kewajiban untuk melakukan perencanaan yang lebih mendalam, di mana mereka didorong untuk merancang dan mempersiapkan pembelajaran (PM) dengan lebih matang. Sekolah menciptakan budaya penilaian yang berkelanjutan melalui forum mingguan "Kamis Giat" yang berfungsi sebagai ajang evaluasi dan berbagi praktik. Pemantauan dilakukan secara kualitatif dengan berbagi video dari proses pembelajaran, yang memastikan adanya pengawasan berbasis bukti di kelas dan membantu guru yang terjebak dalam zona nyaman.

Dampak Terhadap Kemampuan Lulusan (8 Dimensi Profil Lulusan)

Dampak dari Kurikulum Merdeka pada peserta didik ditujukan untuk membangun kemampuan menyeluruh yang dievaluasi melalui 8 Dimensi Profil Lulusan:

- a. **Perkembangan Keterampilan Berpikir Kritis dan Kerja Sama:** Pelaksanaan Kurikulum Merdeka berhasil meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan daya kreasi siswa. Kerjasama dan komunikasi ditingkatkan melalui perubahan tata letak kelas yang berorientasi kelompok dan penyelesaian LKPD.
- b. **Penguatan Karakter Kepemimpinan dan Keterampilan Interpersonal:** Pengaruh karakter dihasilkan dari sistem rotasi ketua kelompok yang dilaksanakan setiap bulan. Aktivitas ini melatih kepemimpinan dan rasa percaya diri, memungkinkan siswa yang awalnya pendiam untuk berani berbicara dan melakukan presentasi, serta membantu mengurangi kesenjangan sosial di antara siswa.
- c. **Penilaian yang Beragam:** Meskipun perhatian tertuju pada aspek karakter menghasilkan dampak yang positif, evaluasi keseluruhan terhadap Kurikulum Merdeka menunjukkan

adanya pengaruh yang baik dan buruk terhadap pencapaian belajar siswa (Enawati et al., 2024), menandakan bahwa penerapan masih memerlukan evaluasi lebih dalam untuk menyelaraskan antara konsep kurikulum dan kondisi aktual di lapangan.

Tantangan dan Strategi Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SDN Sumur Welut 3 Surabaya

Proses penerapan Kurikulum Merdeka di SDN Sumur Welut 3 Surabaya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang memengaruhi kesiapan guru, efektivitas pembelajaran, dan manajemen pelaksanaannya. Tantangan tersebut muncul seiring dengan perubahan pendekatan pembelajaran yang menekankan fleksibilitas, diferensiasi, serta penekanan pada perkembangan karakter peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat dua tantangan utama yang dihadapi oleh sekolah, yaitu tantangan manajemen waktu serta kesiapan dan pola pikir guru. (Masri et al., 2023)

Tantangan pertama berkaitan dengan manajemen waktu. Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum menyampaikan bahwa proses implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan pendalaman dan pendampingan intensif kepada guru. Hal ini menuntut adanya waktu tambahan untuk mengikuti pelatihan, kegiatan diseminasi, hingga supervisi pembelajaran. Bahkan beberapa kegiatan dilakukan pada akhir pekan, sehingga membutuhkan komitmen kerja yang lebih tinggi dari para pendidik. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan kelelahan, namun dipandang sebagai konsekuensi penting dalam upaya menyesuaikan diri dengan perkembangan kurikulum dan kebutuhan pembelajaran siswa.

Tantangan kedua adalah perbedaan pola pikir (mindset) dan kesiapan guru dalam menerima perubahan. Tidak semua guru memiliki motivasi yang sama dalam mengembangkan diri. Sebagian guru memiliki growth mindset atau pola pikir bertumbuh, yaitu terbuka terhadap perubahan dan pembelajaran baru. Namun, terdapat pula guru yang masih mempertahankan kebiasaan lama dan enggan keluar dari zona nyaman. Hal ini menyebabkan penerapan Kurikulum Merdeka berjalan tidak serempak. Meskipun demikian, sekolah tetap melakukan pendekatan persuasif melalui diseminasi dan contoh praktik baik sehingga guru yang belum siap dapat mengikuti perkembangan secara bertahap.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, sekolah menerapkan beberapa strategi. Salah satunya adalah penguatan supervisi dan monitoring oleh Kepala Sekolah. Kepala Sekolah melakukan supervisi klinis baik terhadap pelaksanaan pembelajaran maupun kelengkapan administrasi pembelajaran, sehingga guru mendapatkan pendampingan sekaligus evaluasi berkelanjutan. Selain itu, kegiatan pelatihan dan diseminasi hasil pelatihan dari Wakil Kepala Sekolah kepada guru menjadi upaya strategis dalam pemerataan pemahaman terkait penyusunan perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran berdiferensiasi, hingga penguatan karakter peserta didik.

Dengan strategi tersebut, pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SDN Sumur Welut 3 terus mengalami peningkatan kualitas secara bertahap. Pendekatan kolaboratif, komitmen pengembangan diri, serta supervisi yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan sekolah dalam memastikan pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, kreatif, dan mampu berkembang sesuai potensi masing-masing.

Kesiapan Orang Tua dengan Adanya Kurikulum Merdeka

Orang tua berfungsi sebagai pendidik dalam menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak mereka. Setiap orang tua tentunya memiliki harapan dan sasaran untuk masa depan anak-anak mereka. Dalam konteks ini, orang tua harus aktif terlibat untuk mewujudkan harapan tersebut. Salah satu poin penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kurikulum merdeka adalah partisipasi orang tua. Orang tua memiliki peran strategis dalam mendorong dan memberikan dukungan kepada anak-anak mereka untuk meraih hasil belajar yang maksimal (Nurwidyayanti et al., 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, pihak sekolah mengungkapkan bahwa orang tua siswa menunjukkan kesiapan dalam menghadapi penerapan Kurikulum Merdeka di SD Sumur Welut 3. Sejak awal tahun ajaran, sekolah telah melaksanakan sosialisasi yang mendalam mengenai konsep, tujuan, dan cara pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Proses sosialisasi ini dirancang untuk memastikan orang tua memahami perbedaan metode pengajaran yang digunakan dan arah pendidikan yang ingin dicapai oleh sekolah.

Di samping itu, karakteristik orang tua di lingkungan sekolah yang sebagian besar berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke bawah membuat mereka cenderung memberikan kepercayaan penuh kepada sekolah dalam mendidik anak-anak mereka. Umumnya, orang tua menyerahkan proses pendidikan kepada guru dan institusi tanpa banyak tuntutan atau keberatan terhadap perubahan kurikulum.

Sekolah juga dengan aktif berusaha menghindari potensi masalah yang mungkin dihadapi orang tua, seperti dalam penggunaan teknologi. Ketika pembelajaran memerlukan penggunaan perangkat atau internet, guru menawarkan opsi seperti sistem pinjam antar siswa. Strategi ini diambil agar tidak ada siswa atau orang tua yang merasa terbebani atau tertinggal.

Keterlibatan Orang Tua dalam Proses Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak dapat meningkatkan pencapaian akademis, semangat, serta sikap positif terhadap sekolah dan proses belajar. Namun, dalam situasi Kurikulum Merdeka yang mengharuskan kemandirian dan inisiatif siswa, posisi orang tua menjadi lebih kompleks. Mereka dituntut tidak hanya untuk memberikan dukungan finansial, tetapi juga harus memahami konsep serta tujuan dari kurikulum itu sehingga bisa memberikan bantuan yang sesuai dan efektif (Nurwidyayanti et al., 2024). SDN Sumur Welut 3 Surabaya menjamin partisipasi orang tua dalam penerapan Kurikulum Merdeka melalui serangkaian strategi yang terencana dan berkelanjutan.

Pertama, lembaga pendidikan melibatkan komite sekolah sebagai wakil yang berfungsi sebagai penghubung antara institusi dan orang tua. Komite ini memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum, terutama dalam memberikan umpan balik, koordinasi, dan dukungan untuk program sekolah. Kedua, lembaga pendidikan menyelenggarakan sosialisasi rutin terkait program kurikulum dan kegiatan belajar, terutama di awal tahun ajaran. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang tua memahami

kebijakan yang diterapkan dan menghindari kesalahpahaman. Ketiga, lembaga pendidikan membentuk kelompok orang tua per kelas, yang berfungsi untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi mengenai program kelas, aktivitas siswa, dan dukungan dalam proses belajar. Selanjutnya, kelompok tersebut memanfaatkan grup pada media sosial WhatsApp orang tua sebagai sarana komunikasi yang aktif. Guru secara berkala membagikan informasi tentang kegiatan anak, termasuk video proses belajar, sehingga orang tua dapat mengetahui dan memahami bagaimana pembelajaran berlangsung di lingkungan sekolah. Selain itu, sekolah juga menetapkan prosedur untuk menyelesaikan masalah secara berjenjang melalui komite dan sekolah sebelum mengadukan ke media sosial. Tujuannya adalah untuk menjaga komunikasi tetap efektif dan profesional.

Strategi Wakil Kepala Sekolah dalam Memanfaatkan Teknologi Digital Untuk Mendukung Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Kurikulum bebas akan lebih menekankan materi penting dan keterampilan siswa yang disesuaikan dengan fasenya. Kurikulum bebas ini diharapkan menjadikan pembelajaran lebih mendalam, santai, dan bermakna. Media pembelajaran interaktif memungkinkan interaksi atau timbal balik antara guru dan siswa. Media seperti tampilan teks, gambar, video, dan audio memungkinkan siswa mengomentari atau memberikan pendapat tentang informasi yang ditampilkan. Jika digunakan dalam kurikulum belajar merdeka, diharapkan bahwa pembelajaran interaktif akan mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran interaktif juga dapat meningkatkan pemikiran kritis dan kreativitas siswa, meningkatkan kemampuan mereka, dan meningkatkan sikap mereka. Selain itu, pembelajaran interaktif juga dapat digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran baru dan sebagai sarana untuk meningkatkan hasil belajar (Muntatsiroh & Hendriani, 2023). SDN Sumur Welut 3 Surabaya memiliki Strategi Wakil Kepala Sekolah dalam Memanfaatkan Teknologi Digital Untuk Mendukung Pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

SDN Sumur Wulut terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Setiap kelas telah dilengkapi dengan perangkat pendukung seperti proyektor dan LCD, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Melalui pembelajaran berbasis audio-visual, siswa dapat menerima materi dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan.

Selain itu, laboratorium komputer di SDN Sumur Wulut juga sudah dapat digunakan oleh seluruh siswa. Fasilitas ini mendukung penerapan teknologi digital dalam proses belajar, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan literasi digital, mencari referensi, dan menemukan kata kunci untuk memperluas wawasan mereka.

Dengan dukungan sarana modern dan suasana belajar yang kondusif, SDN Sumur Wulut berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang edukatif, kreatif, dan berorientasi pada kemajuan teknologi.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SDN Sumur Welut 3 Surabaya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya ditentukan oleh dokumen perencanaan, tetapi juga oleh kepemimpinan kurikulum yang efektif. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum berperan sebagai pengarah, fasilitator, dan pendamping dalam memastikan keselarasan kurikulum dengan visi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Melalui pembentukan tim pengembang kurikulum, pembaruan visi-misi, penyusunan rencana pembelajaran tahunan, pelaksanaan diklat, serta diseminasi praktik pembelajaran, Kurikulum Merdeka dapat diadaptasi sesuai konteks sekolah. Meskipun demikian, tantangan seperti manajemen waktu pendampingan guru serta perbedaan kesiapan dan mindset guru dalam menerima perubahan menjadi faktor yang memengaruhi kelancaran implementasi. Strategi supervisi klinis oleh Kepala Sekolah, penguatan kolaborasi antar guru, dan pendampingan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memastikan peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan tersebut, Kurikulum Merdeka mampu memberikan kontribusi positif dalam membentuk kompetensi akademik dan karakter peserta didik melalui pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SDN Sumur Welut 3 Surabaya yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan izin, serta memberikan informasi yang mendalam terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Kepala Sekolah, dewan guru, dan seluruh pihak sekolah yang turut mendukung kelancaran proses penelitian dan wawancara. Penulis juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kurikulum yang telah memberikan arahan, bimbingan ilmiah, serta motivasi dalam penyusunan artikel ini. Tidak lupa penulis menghargai dukungan rekan satu tim yang telah bekerja sama dengan penuh tanggung jawab sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik pembelajaran dan kajian akademik terkait Kurikulum Merdeka.

REFERENSI

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Aulia, I. N., & Darmansah, T. (2025). Peran Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di SMPN 8 Percut Sei Tuan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(4), 3197–3206. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i4.5182>
- Azizah, F. S. (2025). *Firda s azizah nim*. 21591078.
- Enawati, E., Supardi, S., & Lubna, L. (2024). Dampak Evaluasi Penerapan Kurikulum Merdeka Terhadap Prestasi Belajar Siswa di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 1710–

1715. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i3.2406>

- Isnayanti, A. N., Putriwanti, Kasmawati, & Rahmita. (2025). Integrasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dalam Kurikulum Sekolah Dasar: Tantangan dan Peluang. *CJPE: Cokroaminoto Journal of Primary Education*, 8, 911–920.
- Kollo, N., & Suciptaningsih, O. A. (2024). Keterampilan Berpikir Kritis Siswa melalui Penerapan Kurikulum Merdeka. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1452–1456. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3845>
- Lailatul Istiqomah, E. H. (2023). Implementasi Profil Pelajar Pancasila pada Konsep Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka Lailatul. *JURNAL PENDIDIKAN TEMATIK*, 8(2), 85–94.
- Masri, M., Rusdinal, R., & Gistituati, N. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan kurikulum merdeka belajar. *RTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(4), 347–352. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/30032794000> Contents lists available at Journal IICET JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic) Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti> Implementasi
- Muntatsiroh, A., & Hendriani, S. (2023). *JKIP: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Curriculum at SMKN 3 Sijunjung Strategi Kepala Sekolah Dalam Memfasilitasi Implementasi Kurikulum Merdeka Di SMKN 3 Sijunjung*. 3(2), 100–106.
- Nursafinah, S., Aisah, S., & Pricilia, H. (2024). *Peran Kurikulum Merdeka Untuk Memajukan Kualitas Pembelajaran di Sekolah*. 3, 9050–9059.
- Nurwidyayanti, N., Irwandi, A., Rahim, A., Muhammad, A. F., & Rizal, A. (2024). Peran Orang Tua dalam Mendukung Pembelajaran Kurikulum Merdeka. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 6537–6542. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.5226>
- Pangkey, R. D. H., & Sarudi, R. (2024). Kurikulum Merdeka dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Journal on Education*, 6(4), 22104–22113. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6331>
- Panjaitan, K., Tantri, J., Simatupang, L. R., Selviana, S., Kinanthi, A. C., Setiyadi, B., & Lestari, A. (2024). Memahami Pendekatan Dan Organisasi Kurikulum. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(1), 149–157. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i1.449>
- Rahmat, & Wahyudin, D. (2021). Penguatan Peran Kepemimpinan Kurikulum (Curriculum Leadership) Wakil Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan Kepemimpinan Pembelajaran (Instructional Leadership). *JURNAL UPI*, 18(1), 10–17. <https://doi.org/doi.org/10.17509/jik.v18i1.36013>
- Sundari, & Pharama, T. E. (2021). Stakeholders dalam Pendidikan. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, 5(2), 285–296.
- Yunita, A. Z. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *Journal of Educational Management*, 4(1), 16–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.37411/jjem.v4i1.2122>
- Zahrotun, I., & Kamal, R. (2023). Analisis Efektivitas Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Berpikir Kritis Pada Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(2), 9–14. <https://doi.org/10.56997/pgmi.v2i1.1278>